

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan di suatu daerah dilakukan untuk mendorong perubahan, yang sehingga daerah menjadi maju. Sekarang ini, daerah dituntut untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas umum serta melakukan pemberdayaan masyarakat daerah. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas suatu daerah yang tidak lepas dari kerjasama antara pihak swasta maupun masyarakat.

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan kekhasan suatu daerah. Setiap daerah di dalam mengatur urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat perlu adanya partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena UMKM merupakan salah satu penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi

masyarakat. Kehadiran UMKM tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor UMKM dapat melibatkan banyak orang dengan beragam usaha.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di daerah untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah.

Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dalam mendapatkan dukungan, perlindungan dan pengembangan sebagai wujud

keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Industrialisasi memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik masyarakat melalui perluasan lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pengembangan industri kecil akan membantu mengatasi masalah pengangguran dengan teknologi yang digunakan sehingga bisa memperbesar lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha yang mendorong pembangunan daerah dan kawasan perdesaan.

Struktur lapangan usaha sebagian besar masyarakat Kabupaten Kudus pada tahun 2015 masih tetap pada sektor Industri Pengolahan. Terlihat dari besarnya peranan sektor ini pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Konstruksi kemudian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 2 persen. (PDRB Kab.Kudus 2011-2015: 45) Hal ini dapat dilihat dari peranan PDRB menurut lapangan usaha (persen) pada tahun 2011-2015, seperti yang dijabarkan dalam table 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha (persen)**  
**Kabupaten Kudus Tahun 2011-2015**

(1)	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,45	2,43	2,39	2,31	2,40
B	Pertambangan dan Penggalian	0,10	0,11	0,10	0,11	0,12
C	Industri Pengolahan	81,73	81,86	81,76	81,75	81,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Penadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
F	Konstruksi	3,01	3,11	3,07	3,10	3,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,52	5,24	5,35	5,31	5,53
H	Transportasi dan Pengundangan	0,97	0,94	0,93	0,97	1,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,05	1,02	1,05	1,08	1,16
J	Informasi dan Komunikasi	0,55	0,54	0,52	0,52	0,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,53	1,63	1,66	1,66	1,73
L	Real Estat	0,52	0,51	0,50	0,51	0,53
M, N	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	0,84	0,83	0,80	0,77	0,78
P	Jasa Pendidikan	0,84	0,90	0,95	0,99	1,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29
R, S, T, U	Jasa lainnya	0,48	0,47	0,48	0,49	0,49
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011-2015

Berdasarkan table 1.1 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar bagi PDRB Kabupaten Kudus sehingga sektor ini menjadi sektor utama dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB Kabupaten Kudus lebih besar dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa, sehingga peranan industri sangatlah besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus.

Kabupaten Kudus merupakan daerah terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha, yang terbagi dalam 9 kecamatan. Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan, sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Jiwa dan semangat wirausaha masyarakat diakui ulet, semboyan jigsaw (ngaji dagang) yang dimiliki masyarakat mengungkapkan karakter disamping menjalankan usaha ekonomi juga mengutamakan mencari ilmu. Dilihat dari peluang investasi bidang pariwisata, di Kabupaten Kudus terdapat beberapa potensi yang bisa dikembangkan baik itu wisata alam (Wisata Colo Kudus, Air Terjun Montel, Air Tiga Rasa Muria Kudus), wisata budaya (Museum Kretek Kudus, Museum Jenang Mubarak Kudus), maupun wisata religi (Makan Sunan Kudus, Makam Sunan Muria).

Kabupaten Kudus juga merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang dapat berkembang pesat melalui kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat. Namun, masih belum ada kawasan sentra industri berwawasan wisata di Kabupaten Kudus, padahal kawasan sentra industri tersebut dapat meningkatkan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Potensi industri yang menjadi unggulan di Kabupaten Kudus selain industri rokok, terdapat industri bordir dan pakaian konveksi menjadi industri unggulan yang terkenal karena

produknya beragam. Sentra kerajinan bordir di Kabupaten Kudus terdapat diberbagai Desa di Kecamatan Gebog yaitu di Desa Rahtawu, Karangmalang, Padurenan, Getasrabi dan di Kecamatan Kota berada di Desa Demangan, Janggalan, Kajeksan, Damaran, dan Langgar Dalem. Salah satu desa di Kecamatan Gebog yaitu Desa Padurenan, desa ini mendapatkan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Desa Produktif karena terdapat banyak UMKM masyarakat di desa tersebut khususnya di bidang konveksi dan bordir. Pada tahun 2013 di Desa Padurenan juga terkenal sebagai percontohan kawasan industri konveksi.

Kecamatan Gebog merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kudus yang strategis. Selain berbatasan langsung dengan kabupaten Jepara, di sekitar Kecamatan Gebog juga terdapat lokasi tujuan wisata, yaitu Gunung Muria, selain itu terdapat pabrik rokok, maka sektor dan lapangan usaha yang dapat dikembangkan dikecamatan ini adalah sektor industri, perdagangan, dan wisata alam.

Desa Padurenan di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus merupakan desa yang mendapatkan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Desa Produktif karena terdapat banyak UMKM masyarakat di desa tersebut khususnya di bidang konveksi dan bordir. Jumlah UMKM yang ada di Desa Padurenan kurang lebih 180 UMKM baik makanan (ayam potong, kue kering, bandeng presto, dll), border, kerajinan, konveksi, pengolahan kapuk dan jasa. UMKM di bidang konveksi berjumlah 97 unit usaha yang memproduksi baju, seragam sekolah, jaket, dan lain-lain dengan bahan dasar kain yang dijahit menggunakan mesin jahit listrik.

Para pengusaha konveksi tersebut tersebar hampir di seluruh kawasan Desa Padurenan, dengan pola klaster (kelompok) industri yang berada di perkampungan merupakan kesatuan unit antara rumah, tempat produksi, serta kios-kios pemasaran hasil produksi tidak semua berasal dari *home industry*. Desa Padurenan memiliki berbagai permasalahan baik fisik, pemasaran (untuk yang tidak memiliki kios), maupun manajemen.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah serta penetapan kawasan strategis maka dalam kebijakan pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Kudus senantiasa memperhatikan konektivitas serta potensi daerah yang ada guna mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat pencari kerja, berwirausaha dan koperasi. Penumbuhan usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber-sumber energi untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan oleh industri, koperasi dan UMKM akan berkelanjutan serta memiliki keunggulan kompetitif.

Dilihat dari segi fisik, Desa Padurenan sudah memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang cukup memadai, misalnya untuk kebutuhan air bersih sudah disediakan dari Pamsimas. Namun, untuk limbah konveksi belum mendapat pengolahan yang cukup baik, sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar. Selain

itu masih terdapat rumah dan kios yang tidak layak untuk digunakan kegiatan tempat tinggal, kegiatan usaha untuk membuat produk, dan kegiatan pemasaran yang memerlukan kebutuhan-kebutuhan khusus. Jika melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kudus bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif Koperasi dan UMKM menjadi prioritas, mengingat peran yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja dengan sasaran peningkatan kapasitas kelembagaan, permodalan dan sumber daya manusia pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta akses pasar produk UMKM, dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi maka perekonomian akan semakin tumbuh.

Berbagai permasalahan dalam pemberdayaan UMKM adalah rendahnya kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi terutama permodalan, konsentrasi pekerjaan sumber daya yang bergerak pada usaha yang turun temurun, dan rendahnya penguasaan teknologi proses produksi dan informasi pemasaran. Melalui optimalisasi peranan beberapa lembaga pendamping untuk memperkuat peranan UMKM dan koperasi, penciptaan



semangat kewirausahaan dan pengembangan pemasaran produk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Meskipun akhir-akhir ini sektor riil sudah mulai menggeliat, tapi kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk bersaing murni dengan hasil produk pabrikan, impor atau pemodal besar sangat berat. Fasilitasi pemerintahan dari berbagai aspek akan membantu memperkuat daya saing UMKM. Fokus yang perlu diperhatikan adalah peningkatan manajemen usaha, fasilitasi sarana, prasarana dan permodalan, dan perluasan pangsa pasar. Fasilitasi terhadap UMKM secara bertahap, akuntabel, terencana, adil dan tepat akan meningkatkan kuantitas dan kualitas UMKM

Daerah ini memiliki potensi yang belum dikembangkan oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah dan masyarakat, diantaranya upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan usaha *home industry* yang ada di Desa Padurenan. Berbagai masalah dan potensi yang cukup menjanjikan untuk dapat dikembangkan, dari pemerintah daerah, masyarakat, atau pengrajin dapat dijadikan pertimbangan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan, baik secara fisik, maupun penyediaan fasilitas pendukung produksi dalam mengembangkan wisata industri konveksi yang merupakan keunggulan Desa Padurenan.

Penelitian yang berjudul Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konvesi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, penulis di dalam melakukan penelitian juga mengacu dari beberapa karya ilmiah yang berupa jurnal

atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian. Penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Penelitian yang pertama diambil dari Rohmah (2015) tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo) masalah yang diangkat di dalam penelitian ini bahwa salah satu produk andalan UMKM Kabupaten Probolinggo adalah olahan mangga, terdapat Kelompok Usaha Bersama yang berada di Desa Banjarsari yang merupakan sentra olahan mangga. Akan tetapi, pada kenyataan eksistensi olahan mangga ini masih belum banyak dikenal orang dan masih belum terlihat peningkatan volume UMKM olahan mangga di Kabupaten Probolinggo.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mempertahankan dan meningkatkan UMKM khususnya pada unit usaha olahan mangga, maka diperlukan peran penting dari pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo yaitu dengan cara pemberdayaan, dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo untuk pemberdayaan UMKM olahan mangga ini diwakili oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan strategi Pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan UMKM olahan mangga. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dinkop UKM merupakan pelaksana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal manajerial usaha, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar dan dukungan kemudahan dalam

perijinan. Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) merupakan pelaksana strategi dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal mengelolah mangga dan perluasan akses pasar. Faktor pendukung dalam pemberdayaan adalah dukungan dana dari pemerintah dan klinik konsultasi bisnis, sedangkan faktor penghambat adalah bahan baku musiman dan kualitas sumber daya manusia yang kurang.

Penelitian kedua diambil dari Firmansyah (2014) tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun) masalah yang diangkat dalam penelitian ini bahwa brem merupakan produk unggulan di Kabupaten Madiun. Di dalam mengembangkan usahanya terdapat beberapa kendala-kendala yang menyebabkan hasil produksinya kurang maksimal antara lain minimnya mendapatkan akses permodalan, akses pemasaran, lemahnya manajemen usaha dan jiwa kewirausahaan yang masih kurang. Serta masih banyak pengusaha brem yang belum memiliki ijin usaha perdagangan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendiskripsikan dan Menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Madiun dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Di Sentra Industri Brem Desa Kabupaten Madiun.

Hasil temuan di dalam penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun telah melaksanakan strategi-strategi dalam pemberdayaan UMKM di Sentra

Industri Brem Desa Kaliabu Kabupaten Madiun. Strategi-strategi yang pernah dilakukan oleh Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, antara lain: 1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, 2) Pengembangan Pemasaran, 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4) Strategi pengaturan dan pengendalian.

Penelitian ketiga dari Rifa'I (2013) tentang Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, masalah yang diangkat dalam penelitian ini bahwa di dalam pelaksanaan pertumbuhan UMKM mengalami kendala- kendala dan keterbatasan sehingga kurang mampu untuk berkembang seperti adanya faktor internal dan eksternal, yaitu dari faktor internal masih kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), lemahnya jaringan usaha atau kemampuan penetrasi pasar, mentalitas pengusaha UMKM, kurangnya transparansi, sedangkan dari faktor eksternal kendalanya iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana, pungutan liar, implikasi perdagangan bebas, sifat produk dengan ketahanan pendek, terbatasnya akses pasar dan informasi. Tujuan penelitiannya adalah melihat efektivitas pemberdayaan UMKM Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kedung Rejo.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program pengembangan labsite pemberdayaan UMKM krupuk ikan bisa membantu pengrajin krupuk ikan yang ada di Desa Kedung Rejo terutama pada pengrajin kecil dan musiman yang memang membutuhkan dana untuk meningkatkan pendapatan

serta produksi krupuk ikan dan juga berdampak pada eksisnya potensi yang berada di kampong krupuk ikan.

Penelitian keempat dari Purnanto (2014) tentang Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Dalam Lingkup Klaster Batik Kota Semarang masalah yang diangkat dalam penelitian ini bahwa masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah : *Pertama*, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar peluang pasar. *Kedua*, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. *Ketiga*, kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. *Keempat*, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). *Kelima*, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. *Keenam*, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui implementasi program usaha mikro batik dalam lingkup klaster batik di Kota Semarang dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program usaha mikro batik dalam lingkup klaster batik di Kota Semarang.

Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa proses implementasi pemberdayaan UMKM klaster batik sudah baik karena telah sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 dan hasil implementasi pemberdayaan UMKM klaster batik belum baik karena terdapat beberapa faktor penghambat implementasi seperti kontrol yang tidak rutin, sumberdaya manusia klaster batik didominasi oleh orang-orang tua, sarana dan prasarana belum memadai. Selain itu,

terdapat faktor pendukung implementasi pemberdayaan yaitu kontribusi, komitmen, kesiapan, kompetensi, finansial instansi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, hubungan sosial dan derajat keterlibatan anggota klaster sudah baik.

Penelitian kelima dari Kurniawan (2014) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) dalam Penanggulangan Kemiskinan masalah yang diangkat dalam penelitian ini bahwa kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di dusun Waru Rejo, desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambatnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pemberian modal usaha dan kurang maksimalnya bantuan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pemberdayaan UMKM ini terdapat faktor pendukung dalam pemberdayaan ini adalah terdapatnya sumber daya manusia yang melimpah atau tenaga kerja yang memadai, bahan baku yang mudah ditemukan dan murah, modal usaha yang ringan, mendapat dukungan aparatur desa, supplay bahan baku

lancar dari pemasok, dan adanya kesepakatan harga jual produksi antara anggota kelompok usaha Paguyuban Kembang Waru. Sedangkan, faktor penghambat dalam pemberdayaan ini adalah infrastruktur yang kurang memadai atau rusak, kurang maksimalnya bantuan dari pemerintah, tidak adanya tempat pembuangan limbah, dan tidak adanya sentar pemasaran hasil produksi.

**Tabel 1.2**  
**Matriks Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Pengarang, Edisi Penerbit, Judul</b>	<b>Masalah Penelitian</b>	<b>Teori yang dipakai</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Fathatur Rohmah (2015), “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo)”	Produk andalan UMKM Kabupaten Probolinggo adalah olahan mangga, terdapat Kelompok Usaha Bersama yang berada di Desa Banjarsari yang merupakan sentra olahan mangga. Olahan mangga yang diproduksi oleh Kelompok Usaha Bersama ini meliputi sirup mangga, selai mangga, manisan mangga, dodol mangga. Akan tetapi, pada kenyataan eksistensi olahan mangga ini masih belum banyak dikenal orang dan masih belum terlihat peningkatan volume UMKM olahan	Administrasi pembangunan, strategi, pemerintah daerah, pemberdayaan, usaha mikro kecil menengah	Dinkop UKM merupakan pelaksana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal manajerial usaha, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar dan dukungan kemudahan dalam perijinan. Sedangkan DISPERINDAG



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		mangga di Kabupaten Probolinggo		merupakan pelaksana strategi dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal mengelola mangga dan perluasan akses pasar. Faktor pendukung dalam pemberdayaan adalah dukungan dana dari pemerintah dan klinik konsultasi bisnis, sedangkan faktor penghambat adalah bahan baku musiman dan kualitas sumber daya manusia yang kurang.
2.	Robby Firmansyah (2014), “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi	Minimnya mendapatkan akses permodalan, akses pemasaran, lemahnya manajemen usaha dan jiwa kewirausahaan yang masih kurang. Serta masih banyak pengusaha brem	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun telah melaksanakan strategi-strategi dalam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun)	yang belum memiliki izin usaha perdagangan	Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kelebihan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	pemberdayaan UMKM di Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kabupaten Madiun. Strategi-strategi yang pernah dilakukan oleh Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, antara lain: 1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, 2) Pengembangan Pemasaran, 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4) Strategi pengaturan dan pengendalian.
3.	Bachtiar Rifa'I (2013), "Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite	Pelaksanaan pertumbuhan UMKM mengalami kendala- kendala dan keterbatasan sehingga kurang mampu untuk berkembang seperti adanya faktor internal dan eksternal, yaitu dari faktor internal masih kurangnya	Efektivitas dan pemberdayaan masyarakat	Adanya program pengembangan labsite pemberdayaan UMKM krupuk ikan bisa membantu pengrajin krupuk ikan yang ada di Desa Kedung Rejo terutama pada pengrajin kecil dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”	permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), lemahnya jaringan usaha atau kemampuan penetrasi pasar, mentalitas pengusaha UMKM, kurangnya transparansi, sedangkan dari		musiman yang memang membutuhkan dana untuk meningkatkan
		faktor eksternal kendalanya iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana, pungutan liar, implikasi perdagangan bebas, sifat produk dengan ketahanan pendek, terbatasnya akses pasar dan informasi.		pendapatan serta produksi krupuk ikan dan juga berdampak pada eksisnya potensi yang berada di kampung krupuk ikan.
4.	Cahyo Uji Purnanto (2014), “Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Dalam Lingkup Klaster Batik Kota Semarang	Masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah : <i>Pertama</i> , kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar peluang pasar. <i>Kedua</i> , kelemahan dalam struktur permodalan	Implementasi Kebijakan Publik	Proses implementasi pemberdayaan UMKM klaster batik sudah baik karena telah sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 dan hasil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. <i>Ketiga</i>, kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. <i>Keempat</i>, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). <i>Kelima</i>, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. <i>Keenam</i>, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.</p>		<p>implementasi pemberdayaan UMKM klaster batik belum baik karena terdapat beberapa faktor penghambat Implementasi seperti kontrol yang tidak rutin, sumberdaya manusia klaster batik didominasi oleh orang-orang tua, sarana dan prasarana belum memadai. Selain itu, terdapat faktor pendukung implementasi pemberdayaan yaitu kontribusi, komitmen, kesiapan, kompetensi, finansial instansi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, hubungan sosial dan derajat keterlibatan anggota klaster sudah baik.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Ferry Duwi Kurniawan (2014) “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkh) dalam Penanggulangan Kemiskinan”	Aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang	pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penanggulangan kemiskinan	Proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pemberian modal usaha dan kurang maksimalnya bantuan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Faktor pendukung dalam pemberdayaan ini adalah terdapatnya sumber daya manusia yang melimpah atau tenaga kerja yang memadai, bahan baku yang mudah ditemukan dan murah, modal usaha yang ringan, mendapat dukungan aparatur desa, supplay bahan baku lancar dari pemasok,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				dan adanya kesepakatan harga jual produksi antara anggota kelompok usaha Paguyuban Kembang Waru. Sedangkan, faktor penghambat dalam pemberdayaan ini adalah infrastruktur yang kurang memadai atau rusak, kurang maksimalnya bantuan dari pemerintah, tidak adanya tempat pembuangan limbah, dan tidak adanya sentar pemasaran hasil produksi.

Dengan hal tersebut, dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam UMKM terjadi dari berbagai faktor internal maupun eksternal seperti kurangnya permodalan, kualitas sumber daya manusia, sulitnya akses informasi, persaingan pasar serta terbatasnya sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pemberdayann UMKM tersebut, sehingga peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan: Bagaimana kondisi pemberdayaan UMKM Sentra Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi pemberdayaan UMKM Sentra Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat tersebut antara lain:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman, wawasan dan pengetahuan keilmuan yang jelas yang berkenaan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM Sentra Konveksi dan Bordir di Desa

Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan kepada Pemerintah daerah dan masyarakat.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama mengikuti proses belajar dibangku kuliah dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk memberi masukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pihak universitas khususnya Departemen Administrasi Publik sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM secara maksimal dalam meningkatkan perekonomian daerah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk lebih mengembangkan potensi yang dimiliki dan mendorong masyarakat



untuk berfikir kreatif dan tidak pantang menyerah dalam mengembangkan keterampilannya.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Administrasi Publik**

Administrasi Publik menurut Nigro & Nigro:

“Administrasi Publik adalah usaha kerja sama kelompok dalam kerangka organisasi negara yang meliputi ketiga cabang yaitu eksekutif (pemerintahan), legislatif (DPR), yudisial/yudikatif (kehakiman) dan hubungan timbal balik antar ketiganya yang mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga merupakan bagian dari proses politik.” (dalam Syafri, 2012: 20)

Rosenbloom and Goldavan mendefinisikan bahwa:

“Administrasi publik adalah penggunaan kepemimpinan secara politis dan berbagai proses dan teori yang sah untuk menjalankan tugas-tugas legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam penyediaan peraturan bagi pelayanan seluruh atau sebagian masyarakat.” (dalam Syafri, 2012: 20)

Woodrow Wilson mendefinisikan:

“Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat, dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat

yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/ swasta.” (dalam Syafri, 2012: 21)

Dari pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Administrasi Publik adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan hal-hal yang berkaitan dengan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk penyelenggaraan negara.

### **1.5.2 Manajemen**

#### **a. Pengertian Manajemen**

Stoner mengemukakan bahwa:

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” (dalam Handoko, 2011:8)

Manajemen menurut George R. Terry mendefinisikan bahwa:

“Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* yang penggunaannya secara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” (dalam Herlambang, 2013:5)

Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen merupakan proses penentuan, menginterpretasikan dalam mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen

yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), dan pengawasan (*controlling*) dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi.

b. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh and McHugh (1997) (dalam Sule, 2008:8), terdiri dari empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
2. Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
3. Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses

memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

4. Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

Keempat fungsi manajemen tersebut, sangat erat hubungannya antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Semua susunan, rencana-rencana, alat-alat pengawasan dan peneliti tidak berguna tanpa adanya penggerak dari orang-orang yang dipimpin, yaitu manusianya. Oleh karena itu, manusia adalah unsur manajemen yang terpenting dalam setiap organisasi. (Herujito, 2006:27)

Berdasarkan pengertian tersebut, menurut (Sule, 2008:6) bahwa manajemen dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, terdapat tiga faktor yang terlibat:

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi.
2. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit, ada tiga alasan utama yang disampaikan oleh George R. Terry (dalam Herlambang, 2013:6), mengapa manajemen dibutuhkan:

1. Untuk mencapai tujuan
2. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi
3. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
4. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Di dalam melaksanakan kegiatan organisasi pasti dibutuhkan sebuah manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya yang ada di organisasi tersebut. Manajemen perlu adanya kerjasama didasarkan dengan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota dalam organisasi agar suatu kegiatan dapat dicapai sesuai tujuan dengan efektif dan efisien.

Manajemen selalu memiliki tujuan yang ditetapkan sebelum kegiatan dilakukan. Tujuan tersebut merupakan sasaran yang hendak dicapai melalui kegiatan yang diatur oleh manajemen. Di dalam sebuah manajemen tidak dapat

dilakukan sendiri untuk melaksanakan kegiatannya, tetapi diperlukan orang lain. Oleh karena itu, manajemen harus dapat mengerakan sekelompok manusia dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, tetapi setiap manusia memiliki motif, emosi, aspirasi, dan kepentingan yang berbeda-beda. Dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya manajemen diperlukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

### 1.5.3 Manajemen Publik

Overman dalam Pasolong (2007:83) mengemukakan manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.

Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik mengemukakan perkembangan manajemen publik dipengaruhi oleh beberapa pandangan, diantaranya:

#### 1. Manajemen Normatif

Pandangan manajemen normatif melihat manajemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Efektifitas dari proses tersebut diukur dari apakah kegiatan organisasi direncanakan, diorganisir, dikoordinasikan, dan dikontrol secara efisien atau tidak.

#### 2. Manajemen Deskriptif

Pandangan ini dapat diamati melalui pemberian fungsi manajemen yang terdiri atas kegiatan personal, interaktif, administratif, dan teknis kepada manajer dalam memimpin organisasi.

### 3. Manajemen Strategik

Konsep manajemen strategik membicarakan hubungan antara organisasi dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal sekaligus cara agar dapat mengendalikan arah perjalanan organisasinya menuju sasaran yang dikehendaki.

### 4. Manajemen Publik

Pandangan ini mendesak agar ilmu administrasi publik segera mengarahkan perhatiannya kepada orientasi atau hasil dari suatu organisasi.

### 5. Manajemen Kinerja

Konsep manajemen kinerja didasarkan pada asumsi bahwa, jika pegawai memahami apa yang diharapkan dari seorang manajer dan diberdayakan dalam penentuan tujuan yang akan dicapai, maka mereka akan menunjukkan kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## **1.5.4 Pemberdayaan**

### **1.5.4.1 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan proses menyeluruh suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Nugroho, 2007:117)

Pengertian pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

1. Perbaiki ekonomi, terutama kecukupan pangan.
2. Perbaiki kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan).
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
4. Terjaminnya keamanan.
5. Terjaminnya hak asasi manusia.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan perkataan lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat (1999) (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:47), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Di dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya



serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Di dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut persediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasmita, 1996) (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:48)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan menuju pembangunan masyarakat yang muncul karena adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada dilingkungan masyarakat.

#### **1.5.4.2 Upaya Pemberdayaan Masyarakat**

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi (Mardikanto dan Soebiato, 2012:41), yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan

dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).

Di dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Di dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.

3. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Di dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat,

memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

#### **1.5.4.3 Indikator Pemberdayaan**

Menurut Parsons (dalam Suharto, 2009:63) Pemberdayaan mencakup 3 (tiga) dimensi yang meliputi:

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Menurut Sunyoto Usman (2004:21) keberhasilan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta mempunyai 5 (lima) indikator pokok, yaitu:

1. Bantuan dana sebagai modal usaha
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat
3. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat
4. Pelatihan bagi sosial ekonomi masyarakat

## 5. Penguatan kelembagaan kepada masyarakat

### 1.5.4.4 Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi-tawar”. Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*).

Sumadyo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:113) merumuskan tiga pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebutnya Tri Bina, yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.

#### 1. Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini, dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang paling unik. Sebab, selain sebagai salah satu sumberdaya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manajemen. Termasuk dalam upaya Bina Manusia, adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas yaitu:

- a) Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan;
- b) Pengembangan Kapasitas Entitas/Kelembagaan, yang meliputi:
  - Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi;
  - Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi;
  - Proses organisasi atau pengelolaan organisasi;
  - Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya;
  - Interaksi antar individu di dalam organisasi;
  - Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain
- c) Pengembangan Kapasitas Sistem (Jejaring), yang meliputi:
  - Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama;
  - Pengembangan interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

## 2. Bina Usaha

Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal seperti:

- a) Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk;
- b) Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan;
- c) Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal;

- d) Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi;
- e) Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat.

### 3. Bina Lingkungan

Pengertian lingkungan, seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tetapi, perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Termasuk dalam tanggungjawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan (areal kerja) maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal/perseroan. Sedang, yang termasuk tanggungjawab lingkungan, adalah kewajiban dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### **1.5.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

##### **1.5.5.1 Karakteristik UMKM**

UMKM saat ini sebagian besar usahanya bersifat perorangan dan keberadaan UMKM juga memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar. Hal ini disebabkan karena sifat usahanya yang kurang teroganisir. Di dalam memahami permasalahan tersebut, diperlukan pemahaman mengenai karakteristik Usaha Kecil. Karakteristik tersebut, sebagai berikut (Anoraga dan Sudantoko, 2002:225):

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadangkala pembukuan tidak di *up to date*, sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekankan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard an harus terapan.

#### **1.5.5.2 Upaya Pengembangan UKM**

Menurut Tambunan (2000:21) dalam pengembangan UKM pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan mencermati permasalahan yang dihadapi UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal berikut:

1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif
2. Bantuan permodalan
3. Pengembangan kemitraan
4. Pelatihan

5. Membentuk lembaga khusus
6. Memantapkan asosiasi
7. Mengembangkan promosi
8. Mengembangkan kerjasama yang setara

#### **1.5.5.3 Pemberdayaan UMKM**

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyatakan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dari penjelasan tersebut, maka pemberdayaan UMKM adalah upaya untuk membangun UMKM dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dari UMKM yang ada dan berupaya untuk mengembangkannya.

#### **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus merupakan suatu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan suatu usaha yang ada di masyarakat. Keberhasilan Pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari:

- 1) Bantuan dana sebagai modal usaha yang diterima dari Pemerintah



- 2) Sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha
- 3) Penyedia sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi konveksi dan bordir
- 4) Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat
- 5) Pengembangan sumberdaya manusia

## **1.7 Metode Penelitian**

Menurut Arikunto (2010:203) berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Menurut Sugiyono (2008:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif karena metode kualitatif digunakan untuk memahami makna-makna secara mendalam. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh penulis karena penelitian ini akan mengeksplorasi

untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan yang mendalam mengenai kenyataan atau fakta yang relevan terkait upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Di dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kabupaten Kudus sebagai situs penelitian atau daerah penelitian, dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah industri yang sedang berusaha mengembangkan sentra industri konveksi melalui upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sentra konveksi di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Peneliti memilih Kecamatan Gebog karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh industri.

Di Kecamatan Gebog terdapat 11 desa yang hampir memiliki industri kecil ataupun kerajinan di setiap desanya, namun yang menjadi sentra industri konveksi hanya ada 2 (dua) desa yaitu Desa Klumpit dan Desa Padurenan. Di dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah Desa Padurenan, karena desa tersebut pernah di nobatkan sebagai desa percontohan sentra industri konveksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, sehingga lokasi tersebut cocok untuk digunakan sebagai situs penelitian untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

### 1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan informan yang akan dimintai keterangan dalam penelitian ini yang terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Di dalam penelitian ini untuk mencari informan dilakukan dengan sistem *purposive sampling* (pengambilan dengan sengaja) artinya teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu untuk memperoleh *key informan* (orang-orang yang mengetahui dengan benar dan terpercaya). Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan pertimbangan tersebut adalah individu-individu yang akan dijadikan sampel/informan dan diharapkan dapat secara spesifik memberi pemahaman tentang permasalahan dan fenomena dalam penelitian. (Sugiyono, 2008: 218)

Informan yang akan dijadikan subjek penelitian adalah:

- a. Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kudus
- b. Staff Bidang UMKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus
- c. Kepala Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus
- d. Masyarakat Pelaku UMKM Konveksi dan Bordir Desa Padurenan

#### 1.7.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengamatan langsung atau wawancara dengan informan. Di dalam penelitian ini informan yang digunakan sebagai data primer adalah informan dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus, dan Kepala Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber data ini berasal dari literatur berupa buku-buku, laporan, dokumen-dokumen, hasil penelitian dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

##### 1. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moelong, 2009:186). Bentuk wawancara dalam penelitian ini,

diberikan kebebasan untuk memberi jawaban atas pertanyaan terbuka. Selain itu interview bebas terpimpin mengarah pada proses tanya jawab menuju pada persoalannya sehingga sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.

## 2. Teknik Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Moelong, 2009:187). Pengamatan langsung (Observasi) dalam penelitian kualitatif didasari beberapa alasan seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moelong, 2007:174-175) antara lain yaitu:

- a. Teknik pengamatan (observasi) didasarkan atas pengalaman secara langsung.
- b. Teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c. Pengamatan memungkinkan bagi peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Mengantisipasi adanya keraguan peneliti terhadap data yang diperoleh.
- e. Teknik pengamatan memungkinkan bagi peneliti untuk memahami situasi yang rumit.
- f. Dalam beberapa kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan. Observasi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

### 3. Dokumen

Dokumen adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen aktual yang berkaitan dengan obyek penelitian. Teknik dokumen ini merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yang menjadi analisis pengamatan adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

#### **1.7.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini akan diperoleh data yang kemudian dianalisis berdasarkan kajian teoritis dengan mempertimbangkan pendapat, pemikiran, persepsi, dan interpretasi dari pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah penelitian tentang upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

Teknik analisis data di dalam penelitian dengan metode kualitatif dapat dibagi menjadi empat, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial. (Sugiyono, 2014:256)

##### **a. Analisis Domain**

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti. Hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah

diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

b. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan. Data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini.

c. Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data yang dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

### 1.7.7 Kualitas Data

Penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Moelong, 2009:330-331) :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada, dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.